

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Konsep Kinerja

Menurut Mangkunegara (2016:67), istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas nya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Edison (2016:190) kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Roziqin (2010:41) secara umum dapat diartikan sebagai keseluruhan proses bekerja dari individu yang hasil dapat digunakan landasan untuk menentukan apakah pekerjaan individu tersebut baik atau sebaliknya.

Menurut Sutrisno (2016:6), kinerja menjadi cerminan kemampuan dan keterampilan dalam pekerjaan tertentu yang akan berdampak pada *reward* dari perusahaan.

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi.

2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Yusuf (2009:1), laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada *stake holder* yang di dalamnya mencakup berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan laporan keuangan, termasuk

komponen asset yang tercermin dalam neraca daerah di mana setiap tahun dibuatkan laporannya setelah pelaksanaan anggaran.

Menurut Mahmudi (2010:9), laporan keuangan sudah bersifat *general purposive*, artinya dibuat lebih umum dan sesederhana mungkin untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, tetapi tidak semua pembaca laporan dapat memahami laporan tersebut dengan baik.

Menurut Munawir (2010:2), laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Menurut SAP No.71 Tahun 2010, laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan catatan atas laporan keuangan.

Tujuan umum laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (SAP No.1, paragraf 9):

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan entitas dana pemerintah.
- b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
- c) Menyediakan informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- e) Menyediakan informasi cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
- g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Tanpa laporan kinerja, laporan keuangan yang disajikan pemerintah akan memberikan informasi yang kurang lengkap kepada penggunanya. Pentingnya informasi surplus dan defisit dalam laporan keuangan pemerintah karena pembiayaan penerimaan mencantumkan adanya penerimaan pinjaman. Ancaman serius apabila informasi dari laporan kinerja tidak dapat disajikan oleh entitas akan menjadikan kebijakan pemerintah menjadi tidak tepat. Contoh utang luar negeri kita yang amat besar merupakan salah satu hasil kebijakan masalalu yang harus di tanggung oleh generasi sekarang akibat dari pembuat kebijakan keuangan tidak mempertimbangkan informasi surplus atau defisit. Informasi surplus atau deficit menjadi amat penting dalam upaya mengentaskan bangsa dari jeratan hutang dan dapat menumbuhkan kemandirian.

2.1.3 Jenis-jenis Transaksi Pemerintah Daerah

Dalam akuntansi keuangan pemerintah daerah, jenis transaksi dapat dirinci berdasarkan struktur APBD yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Daerah, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah, meliputi: pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- b. Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana. Merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah meliputi: belanja langsung dan belanja tidak langsung.
- c. Pembiayaan Daerah, meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah terdiri atas: penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan sisa lebih anggaran tahun berkenaan.
- d. Aset Daerah, meliputi sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masalalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- e. Kewajiban Daerah, meliputi uang yang timbul dari peristiwa masalah yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- f. Ekuitas Dana Daerah, didefinisikan sebagai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

2.1.4 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Menurut Mamduh M.Hanafi dan Abdul Halim, (2012:5), analisis laporan keuangan pada dasarnya, dilakukan karena pemakai laporan keuangan ingin mengetahui tingkat keuntungan dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan.

Menurut Kasmir (2013:66) analisis laporan keuangan adalah:
“Analisis laporan keuangan adalah suatu proses analisis terhadap laporan keuangan dengan tujuan agar dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan saat ini. Dan hasil analisis laporan keuangan juga akan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Dengan mengetahui kelemahan ini, manajemen akan dapat memperbaiki atau menutupi kelemahan tersebut dan kekuatan yang dimiliki perusahaan harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.”

Menurut Agus Sartono, (2012:113), dengan menganalisis laporan keuangan, seorang analisis dapat menilai apakah manajer keuangan dapat merencanakan dan mengimplementasikan setiap tindakan secara konsisten dengan tujuan memakmurkan para pemegang saham. Menganalisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan satu periode dengan periode sebelumnya sehingga diketahui adanya kecenderungan.

Menurut Rudianto (2013:190), analisis laporan keuangan adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan antara akun tertentu dan akun lain dalam laporan keuangan untuk pengambilan keputusan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, sampai pada pemahaman penulis bahwa analisis laporan keuangan merupakan metode atau teknik yang digunakan untuk memahami secara lebih mendalam data di dalam laporan keuangan.

2.1.5 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2013:68) tujuan analisis laporan keuangan adalah:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Dapat juga digunakan sebagai perbandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Menurut Bernstein dalam Hery (2016:114) tujuan dari analisis laporan keuangan yaitu *screening, forecasting, diagnosis, evaluation*, dan *understanding*.

Berdasarkan menurut para ahli maka dapat disimpulkan bahwa tujuan analisis laporan keuangan yaitu penyaringan, peramalan, evaluasi, dan pengertian.

2.1.6 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

Menurut Nunuy Nur Afifah (2009:05), definisi akuntansi menurut *American Accounting* (1996) adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi

atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah.

Ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Baik APBN maupun APBD dia merupakan inti dari akuntansi keuangan pemerintahan. APBN dan APBD merupakan rencana kegiatan pemerintah yang dinyatakan dalam satuan uang dan meliputi rencana pengeluaran dan pemenuhan pengeluaran tersebut.

Setelah dikeluarkannya paket Undang-Undang Keuangan Negara yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka informasi keuangan negara yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilengkapi dengan informasi Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, informasi mengenai Laporan Realisasi APBN/APBD. Pelaporan keuangan pemerintah selanjutnya harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah seperti yang tertuang dalam PP Tahun 2005. Dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa Pemerintah Daerah harus membuat sistem akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah sistem akuntansi untuk mencatat, menggolongkan, menganalisis, mengikhtisarkan dan melaporkan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.

Berdasarkan undang-undang diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaporan keuangan pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah diatur bahwa pemerintah daerah harus membuat sistem akuntansi yang diatur dengan peraturan kepala daerah.

2.1.7 Pertanggungjawaban Laporan Keuangan SKPD Kepada Pemerintah Daerah dan Faktor yang Berpengaruh dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam penggunaan APBD, Dinas Kependudukan dan catatan sipil wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah disusun dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan yang telah disusun dan disampaikan harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No.71 Tahun 2010. Dalam Standar Akuntansi Pemerintah diatur bahwa format dalam penyusunan laporan keuangan harus meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Menurut Halim (2013:20) tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan.

Penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sangat penting dilakukan karena dengan menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, akan mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*), transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara ataupun daerah.

Dalam penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) faktor sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam penyusunan laporan

keuangan. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan sering muncul karena disebabkan oleh SDM yang kurang memadai. Dampak yang ditimbulkan dari kurang memadainya SDM di masing-masing SKPD adalah dalam penyusunan Laporan keuangan akan terjadi kesalahan baik itu dalam bentuk salah catat angka ke dalam laporan keuangan, kesalahan format penyusunan laporan keuangan maupun kesalahan lain yang berpengaruh dalam melakukan pertanggungjawaban SKPD atas penggunaan APBD.

Oleh sebab itu SDM yang memadai dimasing-masing SKPD adalah salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan yang berdampak kepada laporan pertanggungjawaban laporan keuangan SKPD kepada Pemerintah Daerah atas penggunaan APBD.

2.1.8 Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 3 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Menurut Deddi, dkk (2009:1) standar akuntansi pemerintahan adalah tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan.

Berdasarkan para ahli diatas maka dapat disimpulkan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah tuntutan transparansi yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan.

2.1.9 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 lampiran II.2, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah yaitu:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
- b. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- c. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- d. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- f. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Berdasarkan para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan pemerintahan adalah menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya manusia, kewajiban, ekuitas pemerintah, alokasi, ketaatan realisasi terhadap anggarannya.

2.1.10 Penilaian Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang

menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Menurut Halim (2008:230), salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintahan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Menurut Mardiasmo (2009:121) dengan otonomi terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibanding dengan sebelum otonomi daerah.

Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan pendapatan asli daerah. Kehadiran UU nomor 34 tahun 2000 tentang Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaannya adalah momentum dimulainya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah secara penuh (desentralisasi fiskal).

Aspek kedua yaitu disisi manajemen pengeluaran daerah, sesuai azas otonomi daerah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntable dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah. Kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai Reformasi Pembiayaan.

Menurut Helfert (1982) dalam Mohamad Mahsun (2012:135), analisis laporan keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan.

Menurut Abdul Halim (2007:4), penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntasian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Menurut Mahmudi, (2010:146) terdapat beberapa analisis rasio di dalam pengukuran kinerja keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan. Rasio Kemandirian dihitung dengan cara perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Bantuan Pemerintah Pusat atau Propinsi dan Pinjaman.

Rasio Kemandirian

$$= \frac{\text{Pendapat Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintahan Pusat atau Provinsi dan Pinjaman}}$$

Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat ditampilkan dalam rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Pola

hubungan, tingkat kemandirian, dan kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25 –50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber: Abdul Halim (2007)

2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan daerah semakin baik.

Rasio Efektivitas

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah}}$$

Tabel 2.2 Efektivitas Keuangan Daerah

Tabel Efektivitas Keuangan Daerah Efektivitas Keuangan Daerah Otonomi dan Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas (%)
Tidak Efektif	X<100%
Efektif Berimbang	X = 100%
Efektif	X>100%

Sumber: Abdul Halim (2007)

Menurut Mahmudi (2010:146), rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya untuk memperoleh pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}$$

Tabel 2.3 Efisiensi Keuangan Daerah

Tabel Efisiensi Keuangan Daerah	Rasio Efisiensi (%)
Tidak Efisien	X>100%
Efisien Berimbang	X = 100%
Efisien	X<100%

3. Rasio Aktivitas

Menurut Mahmudi (2010:146) analisis proporsi belanja langsung dan tidak langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, yaitu untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran.

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan kegiatan (aktivitas) sedangkan belanja tidak langsung merupakan pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung. Semestinya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, sebab belanja langsung sangat mempengaruhi output kegiatan. Secara sederhana rasio tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja

$$= \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Pengklasifikasian belanja kedalam belanja langsung dan belanja tidak langsung merupakan klasifikasi berdasarkan aktivitas. Dilihat dari sudut pandang sistem pengendalian manajemen sektor publik, belanja langsung dikategorikan sebagai biaya teknik, sedangkan belanja tidak langsung dikategorikan sebagai biaya kebijakan. Belanja langsung dapat dikendalikan melalui manajemen aktivitas, penutupan standar belanja dan standar harga unit. Sementara itu, belanja tidak langsung dapat dikendalikan melalui penetapan anggaran ketat dan efisiensi anggaran.

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode.

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_{n-1}}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan pendapatan} = \frac{\text{Realisasi pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi pendapatan } X_{n-1}}$$

$$\text{Rasio pertumbuhan belanja} = \frac{\text{Realisasi belanja } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi belanja } X_{n-1}}$$

Keterangan:

X_n = Tahun Yang dihitung

X_{n-1} = Tahun Sebelumnya

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Joko Pramono (2014)	Analisis Rasio Keuangan Untuk Melalui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)	Penelitian ini menganalisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta untuk tahun 2010 dan 2011 yang masih kurang atau perlu menjadi perhatian adalah pada aspek keserasian. Kemandirian Pemerintah Kota Surakarta dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan	Peneliti sebelumnya melakukan penelitian di pemerintah kota Surabaya. Sedangkan peneliti melakukan penelitian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi. Dari peneliti sebelumnya menganalisis rasio keuangan, sedangkan peneliti menganalisis kinerja keuangan.
2	Putri Kemala Dewi Lubis dan Nurlia Hafni (2017)	Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja	Penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan	Hasil analisis data menunjukkan adanya kemandirian keuangan daerah	Penelitian sebelumnya melakukan penelitian pemerintah daerah

		Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu tahun Anggaran 2011-2013	kabupaten labuhan batu yang di ukur dengan menghitung Rasio Independensi, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas atau Harmoni, Laju pertumbuhan dan DSCR.	kabupaten labuhan batu tahun anggaran 2011-2013 dalam kategori rendah. Efektivitas keuangan daerah dalam kategori sangat efektif ditahun 2011-2012 dan tidak efektif ditahun 2013. Sedangkan efisiensi keuangan daerah berada pada kategori sangat efisien bila dilihat dari rasio aktivitas pada periode 2011-2012 kabupaten labuhan batu masih memprioritaskan pengeluaran rutin dibanding belanja modal. Pemkab labuhan batu memiliki kesempatan melakukan pinjaman karena memiliki DSCR di atas 250% tiap tahun nya.	kabupaten labuhan batu. Sedangkan, peneliti melakukan penelitian Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota tebing tinggi. Dari peneliti sebelumnya menganalisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten labuhan batu, sedangkan peneliti menganalisis kinerja keuangan pada dinas kependudukan dan catatan sipil kota tebing tinggi.
3	Wahyudi dan Eva (2017)	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi Daeah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Magelang)	Untuk mengetahui bagaimana kinerja dan kemampuan keuangan pemerintah kota Magelang dengan rasio keuangan dan analisis Share	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah belum konsisten, di mana mengalami tren positif dan tren negatif. Kemandiran pemerintah dalam membiayai	Peneliti sebelumnya melakukan penelitian di pemerintah kota Magelang. Sedangkan peneliti melakukan penelitian pada dinas kependudukan kota tebing tinggi.

			Growth.	pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih kurang.	Dari peneliti sebelumnya mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah dalam otonomi daerah kota Magelang, sedangkan peneliti menganalisis kinerja keuangan pada dinas kependudukan dan catatan sipil kota tebing tinggi.
--	--	--	---------	---	---

2.3. Kerangka Konseptual

Pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dalam sektor publik sangat penting dilakukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.

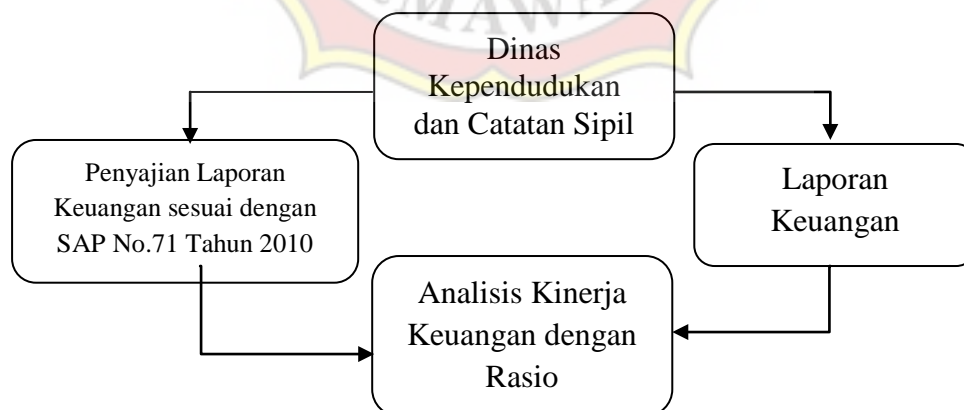
Menurut Mulyadi (2010:416), penilaian kinerja keuangan adalah penentuan dalam secara periodik efektivitas operasional, suatu organisasi, bagian organisasi, bagian organisasi dan keuangannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan adanya teori yang mendukung dalam penelitian ini diharapkan analisis kinerja keuangan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban. Tujuan umum laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Menurut Wibowo (2011:229), pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Kerangka konseptual ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan pusat dan daerah. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi penyusunan standar akuntansi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya. Penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar. Pemeriksa memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan; dan para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual